

PENGARUH LIKUIDITAS DAN KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Agung Kurniawan

Lailatul Amanah

lailatulamanah@stiesia.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

JIAKu

Jurnal Ilmiah
Akuntansi
dan Keuangan

Issn

2963-671X

DOI

10.24034/jiaku.v1i3.
5408

Key word:

*tax aggressiveness,
liquidity,
institusional
ownership,
managerial
ownership, public
ownership*

Kata kunci:

*agresivitas pajak,
likuiditas,
kepemilikan
institusional,
kepemilikan
manajerial,
kepemilikan publik*

Abstract

This research aimed to examine effect of liquidity, institusional ownership, managerial ownership, and public ownership on tax aggressiveness of primary consumptive goods of manufacturing companies that were listed on Indonesia's Stock Exchange (IDX) from 2017-up to 2020. The research was quantitative with purposive sampling as the data collection technique. In the line with that, there were 124 samples from 31 companies that were listed on Indonesia's Stock Exchange (IDX) from 2017-up to 2020. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution) 25. The research result concluded that liquidity had a positive effect on tax aggressiveness with a significance of $0,000 < 0,050$ and a coefficient of 5,468. Likewise, institusional ownership had a positive effect on tax aggressiveness with a significance of $0,000 < 0,050$ and a coefficient of 11,352. On the other hand, managerial ownership did not effect on tax aggressiveness with a significance of $0,370 > 0,050$ and a coefficient of -0,900. Similarly, public ownership did not effect on tax aggressiveness with a significance of $0,477 > 0,050$ and a coefficient of 0,714.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2020. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dan jumlah sampel yang didapat sebanyak 124 sampel dari 31 perusahaan dengan periode tahun 2017-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan dibantu menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,050$ dan nilai koefisien 5,468, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,050$ dan nilai koefisien 11,352, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan nilai signifikansi $0,370 > 0,050$ dan nilai koefisien -0,900, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan nilai signifikansi $0,477 > 0,050$ dan nilai koefisien 0,714.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib dari warga negara oleh negara untuk kepentingan umum. Pada hakikatnya pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban untuk hidup sebagai warga negara di Indonesia. Sumber utama pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Pajak memegang peran penting dalam menunjang kemampuan keuangan negara dalam pelaksanaan program-program negara. Hal ini dapat dilihat dari besaran sumber pendapatan negara menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp 1.543,3 triliun atau 86,5% dari target APBN tahun 2019 (Kemenkeu, 2020).

Membayar pajak sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku merupakan persyaratan bagi badan usaha atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Pajak adalah masalah utama dalam berinvestasi di mana pun mereka berada. Bagi investor yang ingin berinvestasi di negara Indonesia, tingkat pajak seringkali berperan dalam hal investasi. Sebagian besar sistem pajak negara mengharuskan penghasilan kena pajak pada tingkat jenis entitas tertentu, seperti perusahaan atau korporasi. Beberapa peraturan

yang dibuat oleh negara bertujuan untuk membuat iklim bisnis yang adil dan mampu memberikan kontribusi terhadap pemasukan negara dari sektor pajak.

Namun beriringnya waktu, praktek agresivitas pajak muncul pada beberapa perusahaan yang mencari kesempatan untuk menekan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Agresivitas pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Maka dari itu perusahaan akan melakukan berbagai strategi untuk mengurangi pajaknya. Beberapa variabel bebas di dalam penelitian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menekan pajak yang dikenakannya atau melakukan agresivitas pajak seperti struktur kepemilikan atau kepemilikan saham dan likuiditas.

Terkait dengan agresivitas pajak, likuiditas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang rendah dapat mencerminkan kesulitan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kesulitan likuiditas membawa dampak perusahaan melanggar terhadap peraturan pajak sehingga mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan, dikarenakan perusahaan ingin menekan pengeluaran beban pajak atau melakukan penghematan dengan cara mempertahankan arus kas. Maka dari itu, perusahaan dengan likuiditas yang rendah akan cenderung mempunyai tingkat agresivitas pajak yang tinggi.

Menurut Aryani dan Kiswara (2011) struktur kepemilikan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi (*concentrated ownership*) dan kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*). Struktur kepemilikan tersebar (*dispersed ownership*) menunjukkan perbedaan sempurna antara pemilik dan manajer sebagai pengendali perusahaan. Menurut Hastuti (2005) jika antara pemilik dan manajer memiliki kepentingan yang berbeda, muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan (*agency conflict*). Pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen membawa dampak negatif, yaitu keleluasaan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba. Hal ini berkenaan pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri. Kondisi ini terjadi karena antara manajemen dan pihak lain yang tidak memiliki sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen. Oleh karena itu manajer dapat leluasa melakukan agresivitas pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Penelitian ini merupakan terusan dari penelitian Oktaviana dan Wahidahwati (2017) yang berjudul pengaruh kepemilikan saham dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dan penelitian dari Nugraheni dan Murtin (2019) yang berjudul pengaruh kepemilikan saham dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian yang telah disebutkan adalah menggunakan likuiditas sebagai variabel independen dan menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer sebagai sampelnya.

Rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? (2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak? (3) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak (4) Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama membiayai *public investment*.

Menurut Sommerfield *et al.* (1972) pajak yaitu pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik yang bukan dikarenakan akibat dari pelanggaran hukum, tetapi harus dibayarkan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan dengan tidak menerima kompensasi atau imbalan secara porsi atau nilai yang sama, sehingga tujuan ekonomi dan sosial disuatu negara dapat dijalanckannya.

Menurut Andriani (2000) pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Agresivitas Pajak

Menurut Frank *et al.* (2009) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memanipulasi dengan memiliki tujuan meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan cara *tax avoidance* (legal) maupun *tax evasion* (ilegal). Rusydi dan Martani (2014) menyatakan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan para wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga berasal dari kegiatan penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal agresivitas pajak, apabila perusahaan memiliki laba periode berjalan yang tinggi, maka akan berbanding positif dengan tingkat pajak yang dibayarkan. Untuk mengurangi tingkat laba yang dibayarkan, perusahaan akan berusaha mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang (Adisamartha dan Noviari, 2015). Menurut Hlaing (2012) dalam Nugraha dan Meiranto (2015) agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.

Teori Agensi (Agency Theory)

Konsep *Agency theory* menurut Scott (2015) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal.

Dalam perusahaan, hubungan antara *principal* dan agen diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer (Schroeder *et al.*, dalam Christiawan dan Tarigan, 2007). Pemegang saham berperan sebagai principal sementara manajer berperan sebagai agen. Hubungan ini menimbulkan suatu kontrak antara pemegang saham dan manajer. Hubungan kontrak ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pemegang saham dan manajer (Hillier *et al.*, 2010). Manajer sebagai pihak yang mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari memiliki lebih banyak informasi internal dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna informasi eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002).

Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang sama yaitu menginginkan laba sebesar-besarnya dan juga menghindari risiko yang akan terjadi. Agen yang memiliki lebih banyak informasi dibanding *principal* memiliki kesempatan untuk pengambilan keputusan demi kepentingan pribadi. Agen akan mengambil keputusan yang menguntungkannya tanpa memberikan manfaat kepada prinsipal (Sari *et al.*, 2017).

Likuiditas

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2012: 205), likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek atau aktiva lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut.

Menurut Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan berjalan

dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

Struktur Kepemilikan

Di dalam pengelolaan perusahaan yang dimana perusahaan memiliki orang-orang yang berkepentingan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, tentu perlunya pembentukan struktur kepemilikan. Dikarenakan kondisi keterbatasan waktu dan kemampuan, pihak *principal* perlu menunjuk pihak agen yang profesional untuk mengelola perusahaan tersebut dengan baik.

Menurut Sudana (2011: 11) menyatakan bahwa struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam penelitian ini, kepemilikan saham dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta (Oktaviana dan Wahidahwati, 2017). Institusi tersebut antara lain perusahaan investasi, asuransi, bank, reksadana, dana pensiun, dan sebagainya.

Pasaribu *et al.* (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. Menurut Amril *et al.*, (2015), kepemilikan institusi menjalankan tugas untuk memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajemen untuk dapat selalu fokus dalam menjalankan bisnis perusahaan dan menghindari manajer mementingkan diri sendiri.

Kepemilikan Manajerial

Menurut Wahidahwati (2002: 5) kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki manajer.

Proporsi saham yang dimiliki oleh perusahaan dan dinyatakan dalam persentase pada akhir tahun merupakan pengukuran dari kepemilikan manajerial. Menurut Mahadwartha dan Hartono (2002) semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri.

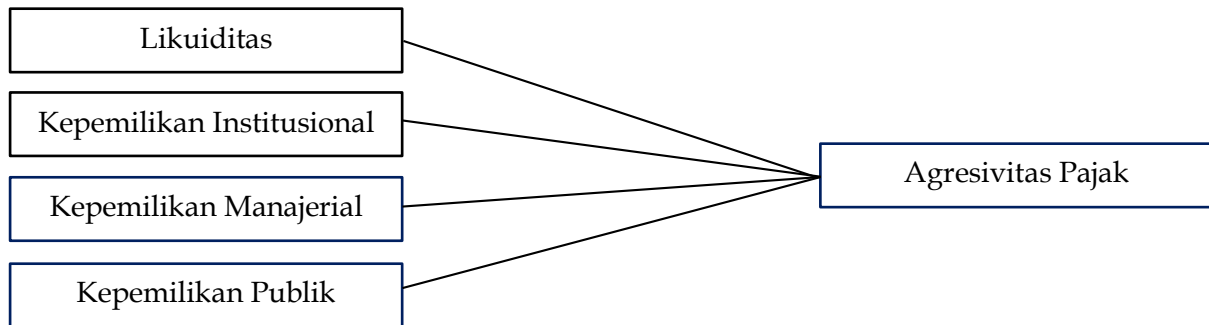
Kepemilikan Publik

Menurut Wijayanti (2009) dalam Yunitasari (2014) kepemilikan publik adalah proporsi atas jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Menurut Yunitasari (2014) kepemilikan publik merupakan persentase yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*). Tujuan perusahaan dengan adanya kepemilikan publik yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan memerlukan pendanaan yang diperoleh dari saham publik atau masyarakat.

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah disebutkan diatas bahwa kepemilikan publik adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak masyarakat dari total saham yang beredar.

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu agresivitas pajak sebagai variabel dependen dengan likuiditas, struktur kepemilikan saham seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik sebagai variabel independen. Adapun kerangka pemikiran seperti yang dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah, 2022

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Tinggi atau rendahnya kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek merupakan definisi dari likuiditas. Kondisi keuangan suatu perusahaan yang baik dapat dilihat dari rasio likuiditas yang tinggi. Apabila rasio likuiditas semakin tinggi, maka investor akan lebih percaya untuk berinvestasi di perusahaan dan lembaga institusional atau kreditur akan lebih percaya untuk meminjamkan modal terhadap perusahaan. Apabila rasio likuiditas semakin rendah, maka investor akan enggan untuk berinvestasi di perusahaan dan lembaga institusional atau kreditur akan enggan untuk meminjamkan modal terhadap perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Arus kas yang baik diharapkan dapat membuat laba perusahaan menjadi tinggi, sehingga perusahaan semakin melakukan agresivitas pajak sebagai upaya untuk menekan beban pajak.

Penelitian yang dilakukan Indradi (2018) menunjukkan bahwa likuiditas dapat berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan perusahaan lebih mementingkan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Semakin tinggi tingkat likuiditas, maka perusahaan lebih agresif dalam menanggapi beban pajaknya karena likuiditas yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi. Hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham di perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan nonbank yang mengelola dana atas nama orang lain. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta (Oktaviana dan Wahidahwati, 2017). Institusi tersebut antara lain perusahaan investasi, asuransi, bank, reksadana, dana, pensiun, dan sebagainya.

Sebagian besar kepemilikan institusional memiliki jumlah saham yang tinggi dibandingkan dengan kepemilikan lainnya yang dimana kepemilikan insitusional memiliki hak atau suara yang tinggi pada pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan agresivitas pajak, kepemilikan institusional berperan sebagai *principal* yang dimana memiliki hak atau suara yang tinggi meminta kepada pihak manajemen sebagai pihak agen untuk melakukan tindakan menekan beban pajak agar memperoleh laba yang tinggi atau semaksimal mungkin.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017) juga menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Salah satu cara untuk mengatasi agensi di suatu perusahaan yaitu dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Apabila manajer memiliki perusahaan, manajer akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham sebagaimana manajer juga memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berdasarkan teori agensi (*agency theory*) yang disebutkan oleh Hillier *et al.* (2010: 13), hubungan antara pemegang saham dan manajer memungkinkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Manajer sebagai pihak yang mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari memiliki informasi internal lebih banyak daripada pemegang saham. Manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan seperti informasi akuntansi seperti laporan keuangan kepada pemegang saham. Apabila kepemilikan manajerial mempunyai nilai saham yang tinggi maka kepemilikan manajerial mempunyai hak atau keputusan yang tinggi. Hal ini juga akan membuat kepemilikan manajerial melakukan tindakan menekan beban pajak atau agresivitas pajak, sehingga perusahaan memperoleh tingkat laba yang tinggi dan pihak manajemen memperoleh bonus yang tinggi.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Oktaviani dan Wahidahwati (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif karena semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi juga nilai tingkat agresivitas pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi dan Hamed (2015) dan Rahmawati *et al.* (2016) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak

Menjual saham kepada masyarakat merupakan salah satu tindakan dalam memperluas pendanaan terhadap perusahaan, dikarenakan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Saham yang dimiliki masyarakat disebut kepemilikan publik.

Kepemilikan publik merupakan saham yang mayoritasnya dimiliki oleh masyarakat umum (publik) dengan melakukan pembelian saham melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan yang sudah *listing* di BEI dan menjadi perusahaan *go public*. Kepemilikan publik merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar atau masyarakat luas, dimana persentase kepemilikan saham dibawah 5%. Dapat dikatakan bahwa kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang minoritas sehingga mereka mempunyai hak atau suara yang kecil sehingga mereka tidak akan bisa memerintah pihak manajemen untuk melakukan agresivitas pajak. Atiah *et al.*, (2016) dan Prayogo (2015) menemukan bahwa kepemilikan publik berperan sebagai penghambat manajemen laba dalam mengurangi penghasilan.

Namun, manajemen laba yang didukung oleh publik adalah yang menaikkan penghasilan, agar memenuhi harapan pasar modal dan meningkatkan harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut.

H₄: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan penelitian ini merupakan korelatif, yang dimana penelitian korelatif merupakan penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Populasi (objek) penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2020.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu sehingga sampel penelitian ini menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2020, (2) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang menerbitkan laporan tahunan

secara lengkap selama tahun 2017-2020, (3) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya rentang tahun 2017-2020, (4) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2017-2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan melakukan studi pustaka yaitu telaah pustaka yang ditujukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian melalui berbagai literatur serta media yang mendukungnya.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang terpengaruh atau variabel yang terikat terhadap variabel independen. Variabel dependen yang ditentukan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, dan maupun kedua-duanya. Proksi agresivitas pajak dalam ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Rumus dari ETR dapat dilihat sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada faktor yang diukur atau dipilih oleh seorang peneliti dalam mengetahui hubungan antara fenomena yang diamati. Singkatnya variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang bebas terhadap variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik.

Likuiditas

Likuiditas dalam penelitian ini merupakan variabel independen yang diukur menggunakan rasio likuiditas (*current ratio*). Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang dapat menampilkan kemampuan perusahaan saat memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rumus dari rasio likuiditas dapat dilihat sebagai berikut.

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Pasiva Lancar}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, baik institusi pemerintah maupun institusi swasta (Oktaviana dan Wahidahwati, 2017). Variabel kepemilikan institusional diukur dengan persentase dari perbandingan jumlah saham yang dimiliki perusahaan institusi dengan jumlah saham yang beredar. Rumus dari kepemilikan institusional dapat dilihat sebagai berikut.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham perusahaan institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang aktif secara ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Variabel kepentingan manajerial diukur dengan persentase dari perbandingan jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dengan jumlah saham yang beredar. Rumus dari kepemilikan manajerial dapat dilihat sebagai berikut.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham pihak manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak masyarakat dari total saham yang beredar. Variabel kepentingan publik diukur dengan persentase dari perbandingan jumlah saham yang dimiliki masyarakat dengan jumlah saham yang beredar. Rumus kepemilikan publik dapat dilihat sebagai berikut.

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Jumlah saham pihak masyarakat}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Menurut Ghozali (2018: 98) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi. Teknik analisis ini mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis yang diajukan. Tujuan dari uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang dilakukan ada 4 yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dimana jika suatu variabel memiliki nilai signifikan ($p > 0.05$) maka variabel tersebut memiliki distribusi normal. Selain itu uji normalitas dapat dicari dengan mengamati distribusi data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau *normal probability plot* (P-Plot). Dasar-dasar pengambilan keputusan menggunakan *normal probability plot* (P-Plot) adalah sebagai berikut: (a) Jika data menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, maka data menunjukkan pola distribusi normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas. (b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data tidak menunjukkan pola distribusi normal atau model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Mutikolinearitas

Menurut Ghozali (2018: 107), uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik sebenarnya tidak timbul adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value*. Ketentuan multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut: (a) Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan *tolerance value* $> 0,1$, maka model regresi bebas dari multikolinearitas, (b) Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 dan *tolerance value* $< 0,1$, maka model regresi terjadi adanya multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018: 111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi terjadi karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya autokorelasi dalam penelitian ini, uji autokorelasi ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Ketentuan-ketentuan uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW) dapat dikatakan sebagai berikut: (a) apabila nilai *Durbin-Watson* (DW) menunjukkan berada di bawah -2 atau kurang dari -2 (< -2) maka terjadi adanya gejala autokorelasi positif, (b) apabila nilai *Durbin-Watson* (DW) menunjukkan diantara -2 dan $+2$ maka tidak terjadi adanya gejala autokorelasi, (c) apabila nilai *Durbin-Watson* (DW) berada di atas $+2$ atau lebih dari $+2$ ($> +2$) maka terjadi adanya gejala autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada pengamatan di dalam model regresi. Menurut Ghazali (2018: 135) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode gambar *scatterplots*. Ketentuan ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut: (a) titik-titik penyebar ada di atas dan di bawah atau sekitar angka 0, (b) titik-titik tidak berkumpul di atas atau di bawah saja, (c) jika titik-titik membentuk pola seperti bergelombang, melebar, menyempit, kemudian melebar kembali, maka dapat dikatakan terjadi adanya heteroskedastisitas, (d) jika titik-titik membentuk pola yang tidak jelas, maka dapat dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji variabel independen yang lebih dari dua terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression*). Menurut Ghazali (2018: 95) model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Persamaan analisis regresi linear berganda dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y: \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	: ETR	X ₁	: Likuiditas
α_0	: Konstanta	X ₂	: Kepemilikan institusional
β_1	: Koefisien regresi X ₁	X ₃	: Kepemilikan manajerial
β_2	: Koefisien regresi X ₂	X ₄	: Kepemilikan publik
β_3	: Koefisien regresi X ₃	e	: <i>Standard error</i>
β_4	: Koefisien regresi X ₄		

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R² adalah kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk melihat seberapa besarnya hubungan yang ditunjukkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen pada proporsi yang sama. Nilai koefisien determinasi rentang diantara 0-1. Ketentuan-ketentuan koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut: (a) jika nilai diatas 0,5, maka nilai koefisien determinasi dapat dikatakan baik atau dengan kata lain suatu variabel independen dapat berpengaruh terhadap variabel dependen, (b) jika nilai dibawah 0,5, maka nilai koefisien determinasi tidak dapat dikatakan dengan baik atau dengan kata lain suatu variabel independen tidak dapat berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Menurut Ghazali (2016) uji statistik F digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Ketentuan-ketentuan uji kelayakan model dapat dilihat sebagai berikut: (a) jika angka signifikansi $\alpha \leq 0,05$, maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen signifikan dan model diterima, (b) jika angka signifikansi $\alpha > 0,05$, maka hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan dan model tidak dapat diterima atau ditolak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (uji statistik t) merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, baik dari percobaan terkontrol maupun terobservasi. Menurut Ghazali (2018: 98) uji statistik t dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Ketentuan-ketentuan dalam uji hipotesis dapat dilihat sebagai berikut: (a) berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terjadi adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis diterima, (b)

berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan 124 sampel pada tabel 1, diketahui deskripsi dari tiap variabel adalah sebagai berikut: (1) diketahui nilai minimum dari variabel agresivitas pajak (ETR) senilai 0,02, nilai maksimal yang didapat senilai 0,64, dengan mean senilai 0,2432, dan standar deviasi senilai 0,07548, (2) diketahui nilai minimum dari variabel likuiditas (LK) senilai 0,72 Untuk nilai maksimum yang didapat senilai 15,82, dengan mean senilai 2,8738, dan standar deviasi senilai 2,55215, (3) diketahui nilai minimum dari variabel Kepemilikan Institusional (KI) senilai 0,01, untuk nilai maksimum yang didapat senilai 0,56, dengan mean senilai 0,1364, dan standar deviasi senilai 0,10074, (4) diketahui nilai minimum dari variabel Kepemilikan Manajerial (KM) senilai 0,00, untuk nilai maksimum yang didapat senilai 0,85, dengan mean senilai 0,0798, dan standar deviasi senilai 0,19165, (5) diketahui nilai minimum dari variabel Kepemilikan Publik (KP) senilai 0,01, untuk nilai maksimum yang didapat senilai 0,50, dengan mean senilai 0,2411, dan standar deviasi senilai 0,15208.

Tabel 1
Analisis statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	124	,02	,64	,2432	,07548
LK	124	,72	15,82	2,8738	2,55215
KI	124	,01	,56	,1364	,10074
KM	124	,00	,85	,0798	,19165
KP	124	,01	,50	,2411	,15208
Valid N (listwise)	124				

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Uji Asumsi Klasik

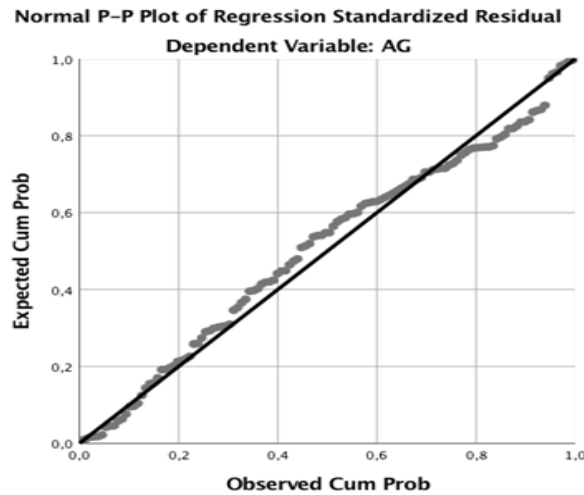
Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 2 diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0,200. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ yang berarti variabel tersebut terdistribusi normal. Adapun juga hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 2.

Tabel 2
Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		Unstandardized Residual
N		124
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05210068
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,066
	Negative	-,070
Test Statistic		,070
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)



Gambar 2
Normal Probability plot (P-Plot)

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Berdasarkan gambar 2, *normal probability plot* (P-Plot) diketahui data menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3, uji multikolinearitas diketahui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di tiap variabel independennya kurang dari 10, *tolerance value* di tiap variabel lebih dari 10. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinearitas bebas dari adanya korelasi antar variabel atau tidak terjadi adanya multikolinearitas.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LK	,393	2,546
	KI	,652	1,535
	KM	,539	1,855
	KP	,997	1,003

a. Dependent Variable: ETR

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Uji Autokorelasi

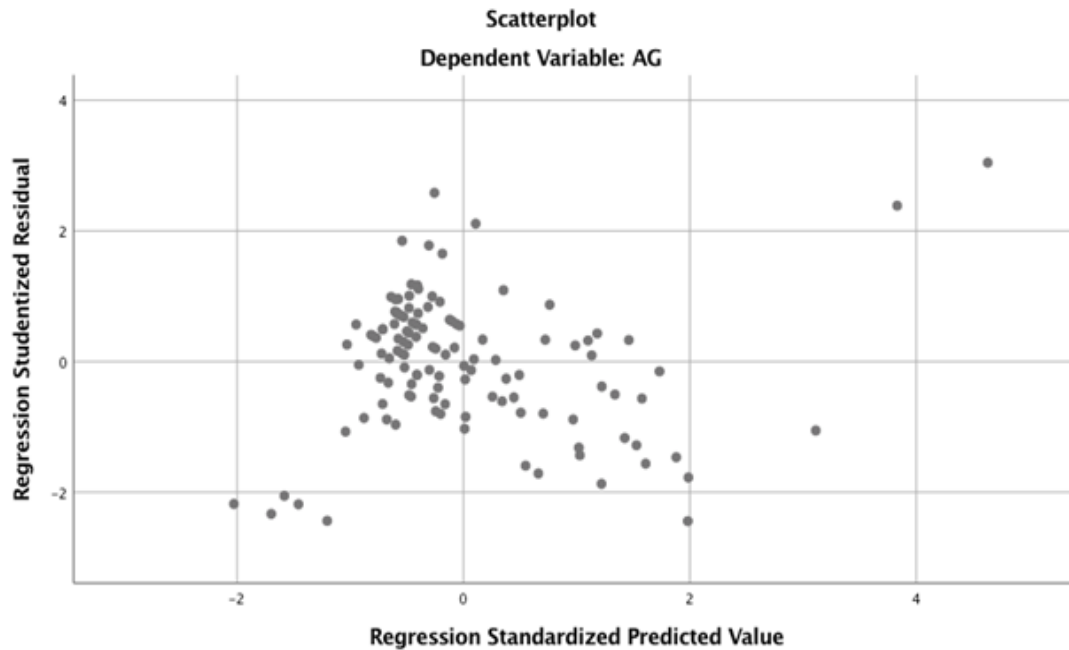
Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,044

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) senilai 1,044 dimana nilai *Durbin-Watson* (DW) menunjukkan di antara -2 dan +2 atau $-2 < 1,044 \leq 2$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, hasil uji autokorelasi pada penelitian ini bebas atau tidak terjadi adanya gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 3. Berdasarkan gambar *scatterplots* pada gambar 3, menunjukkan titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola teratur yang dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.



Gambar 3
Scatterplots Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,102	,016		6,316	,000
LK	,016	,003	,552	5,468	,000
KI	,667	,059	,890	11,352	,000
KM	-,031	,034	-,078	-,900	,370
KP	,022	,031	,045	,714	,477

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 5 dapat diambil persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$ETR = 0,102 + 0,016 LK + 0,667 KI - 0,031 KM + 0,022 KP + e$$

Dengan ditentukan persamaan dan hasil tersebut, analisis regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) nilai konstanta pada regresi linear berganda merupakan penjelasan dari ETR yang merupakan variabel terikat. Berdasarkan hasil pada tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta diketahui senilai 0,102 yang menunjukkan bahwa nilai 0,102 memiliki arah yang positif, (2) berdasarkan pada tabel 5 diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari likuiditas senilai 0,016 yang disimpulkan nilai tersebut memiliki arah yang searah atau positif, (3) berdasarkan pada tabel 5 diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari kepemilikan institusional senilai 0,667 yang disimpulkan nilai tersebut memiliki arah yang searah atau positif, (4) berdasarkan pada tabel 5 diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari kepemilikan manajerial senilai -0,031 yang disimpulkan bahwa nilai tersebut memiliki arah yang berlawanan atau negatif, (5) berdasarkan pada tabel 5 diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari kepemilikan publik senilai 0,022 yang disimpulkan nilai tersebut memiliki arah yang searah atau positif.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 6. Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi senilai 0,524 atau 52,4%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel independen yang terdiri dari likuiditas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik mampu menjelaskan informasi terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak. Sisanya 47,6% dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain dari penelitian ini.

Tabel 6
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,724 ^a	,524	,507	,05297

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)

Hasil uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) dapat dilihat pada tabel 7. Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa terdapat nilai signifikan senilai 0,000 yang berarti nilai signifikan $\leq 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa suatu model regresi pada penelitian ini dikatakan layak untuk diteliti atau dapat diterima.

Tabel 7
Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,367	4	,092	32,686	,000 ^b
Residual	,334	119	,003		
Total	,701	123			

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Hasil uji hipotesis (uji statistik t) dapat dilihat pada tabel 8. Berdasarkan tabel 8, dapat disimpulkan bahwa: (a) likuiditas memiliki nilai t hitung senilai 5,468 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang dapat dikatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan kata lain hipotesis berpengaruh positif atau hipotesis dapat diterima, (b) kepemilikan institusional memiliki nilai t hitung senilai 11,352 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan kata lain hipotesis berpengaruh positif atau hipotesis dapat diterima, (c) kepemilikan manajerial memiliki nilai t hitung senilai -0,900 dengan nilai signifikan $0,370 > 0,05$ yang dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh

terhadap agresivitas pajak dengan kata lain hipotesis hipotesis ditolak, (d) kepemilikan publik memiliki nilai t hitung senilai 0,714 dengan nilai signifikansi $0,477 > 0,05$ yang dapat dikatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan kata lain hipotesis hipotesis ditolak.

Tabel 8
Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Unstandardized Coefficients					
Model	B	Std. Error	t	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	,102	,016	6,316	,000	
LK	,016	,003	5,468	,000	Hipotesis diterima
KI	,667	,059	11,352	,000	Hipotesis diterima
KM	-,031	,034	-,900	,370	Hipotesis ditolak
KP	,022	,031	,714	,477	Hipotesis ditolak

Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah)

Pembahasan

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan uji hipotesis mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak yang dihasilkan pada tabel 8, menunjukkan nilai t hitung senilai 6,316 dengan signifikansi senilai $0,000 < 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh dan memiliki arah yang positif atau searah terhadap agresivitas pajak untuk perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi proporsi likuiditas maka semakin tinggi juga nilai agresivitas pajak. Sehingga asumsi awal peneliti pada pengembangan hipotesis yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak berhasil dibuktikan atau sesuai dengan hasil pada penelitian ini, dengan kata lain hipotesis satu (H_1) diterima.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dalam tempo tertentu. Apabila suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Arus kas yang baik diharapkan dapat membuat laba perusahaan menjadi tinggi, sehingga perusahaan semakin melakukan agresivitas pajak sebagai upaya untuk menekan beban pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Indradi (2018) yang menunjukkan bahwa likuiditas dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Adapun juga Adisamartha dan Noviani (2015) yang menunjukkan bahwa likuiditas dapat berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan perusahaan lebih mementingkan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan uji hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak yang dihasilkan pada Tabel 8, menunjukkan nilai t hitung senilai 0,667 dengan signifikansi senilai $0,000 < 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh dan memiliki arah yang positif atau searah terhadap agresivitas pajak untuk perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga nilai agresivitas pajak. Sehingga asumsi awal peneliti pada pengembangan hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak berhasil dibuktikan atau dengan kata lain hipotesis dua (H_2) diterima.

Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi seperti lembaga atau institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Pihak institusi dengan pihak manajer suatu perusahaan berkaitan dengan teori keagenan yang dimana pihak institusi sebagai

principal dan pihak manajer sebagai agen. Sebagian besar kepemilikan institusional memiliki jumlah saham yang tinggi sehingga kepemilikan institusional memiliki hak atau suara yang tinggi dalam pengambilan keputusan, sehingga pihak institusi dapat meminta kepada pihak agen atau pihak manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak agar memperoleh laba yang tinggi.

Hasil penelitian sejalan dengan Putri dan Lawita (2019) dan Novitasari (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan uji hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak yang dihasilkan pada Tabel 8, menunjukkan nilai t hitung senilai $-0,031$ dengan nilai signifikansi $0,370 > 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh agresivitas pajak untuk perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dapat dijelaskan bahwa tinggi dan rendahnya proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga asumsi awal peneliti pada pengembangan hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak tidak berhasil dibuktikan atau dengan kata lain hipotesis (H_3) ditolak.

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki pihak internal atau pihak manajemen suatu perusahaan dari jumlah saham yang beredar. Mayoritas kepemilikan manajerial memiliki jumlah saham yang kecil dari jumlah saham yang beredar. Berkaitan dengan agresivitas pajak, hal ini berarti bahwa pihak manajemen suatu perusahaan mempunyai hak dan suara yang kecil, sehingga pihak manajemen atau agen tidak melakukan tindakan menekan pajak dengan sendirinya terkecuali jika ada pihak *principal* yang memberi perintah untuk melakukan agresivitas pajak dengan kata lain kepemilikan manajerial atau pihak manajemen tidak akan melakukan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Oktaviani dan Wahidahwati (2017) yang menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun hal ini sejalan dengan Nugraheni dan Murtin (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan uji hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak yang dihasilkan pada Tabel 8, menunjukkan nilai t hitung senilai $0,022$ dengan nilai signifikan senilai $0,477 > 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak untuk perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dapat dijelaskan bahwa tinggi dan rendahnya proporsi kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Sehingga asumsi awal peneliti pada pengembangan hipotesis yang menyebabkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak tidak berhasil dibuktikan atau dengan kata lain hipotesis (H_4) ditolak.

Kepemilikan publik merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan proporsi saham di bawah 5 % dari jumlah saham yang beredar. Keterkaitannya dengan agresivitas pajak, publik atau masyarakat berharap agar perusahaan tidak melakukan tindakan menekan beban pajak yang dikenakan atau agresivitas pajak, dikarenakan publik atau masyarakat akan takut jika perusahaan mendapati masalah ketika melakukan agresivitas pajak, dan berujung nilai saham akan menjadi turun, meskipun kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham secara minoritas yang dimana hak atau suara yang dimiliki publik atau masyarakat terbilang kecil.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Nugraheni dan Murtin (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menguji pengaruh likuiditas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak pada

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2017-2020. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penggunaan metode *purposive sampling* pada penelitian ini terdapat 124 sampel dengan populasi 31 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2017-2020. Dalam pengujian yang menghasilkan hasil serta pembahasan pada penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan semakin tinggi proporsi likuiditas maka semakin tinggi juga nilai agresivitas pajak. Maka dari itu ketika rasio likuiditas perusahaan lebih besar, menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan juga membaik. Hal ini menandakan bahwa perusahaan akan lebih ingin melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga laba yang tinggi dapat membuat kondisi keuangan lebih baik lagi, (2) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan kepemilikan institusional yang mayoritas mempunyai jumlah saham yang banyak dari kepemilikan lainnya seperti kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik di suatu perusahaan, sehingga pihak institusi sebagai pihak *principal* dapat memberi perintah kepada manajemen perusahaan atau pihak agen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga laba yang diperoleh pun semakin tinggi, (3) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan mayoritas jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen di suatu perusahaan mempunyai jumlah yang terbilang kecil dan tidak ada wewenang yang besar sehingga tidak ada kehendak untuk melakukan agresivitas pajak. (4) kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan publik atau masyarakat memiliki jumlah saham di bawah 5% yang terbilang kecil yang dimana masyarakat mempunyai wewenang yang kecil dan juga masyarakat tidak mengharapkan perusahaan melakukan agresivitas pajak, agar perusahaan tidak terkena masalah yang berujung mengakibatkan nilai saham turun.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: (1) penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saja sehingga masih banyak perusahaan pada sektor lainnya yang digunakan sebagai objek penelitian dan dengan kata lain objek pada penelitian ini masih terbatas, (2) variabel independen yang digunakan hanya empat yaitu likuiditas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik dengan kata lain masih banyak variabel independen lainnya yang bisa dijadikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, (3) tahun periode yang digunakan pada objek penelitian hanya empat tahun yaitu 2017-2020 dengan kata lain tahun periode yang digunakan pada objek penelitian masih sedikit.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian di atas terdapat saran-saran yang akan disampaikan sebagai berikut: (1) disarankan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak, diharapkan untuk menambah variabel independen selain dari yang penelitian ini pakai untuk mengembangkan penelitian selanjutnya agar menjadi lebih rinci atau kompleks agar lebih baik dari penelitian ini atau penelitian terdahulu, (2) disarankan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan agresivitas pajak, diharapkan untuk menambah populasi lebih dari satu jenis perusahaan dan menambah periode tahun yang akan diteliti agar penelitian selanjutnya lebih maksimal dan lebih lebih baik dari penelitian ini atau penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, I. B. P. F., dan Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(3), 973-1000.
- Ali, I. (2002). Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. *Lintasan Ekonomi*, XIX(2), 83-95.

- Amril, A., Puspa, D. F., dan Fauziati, P. (2015). Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013. *Journal of Financial Economics* 7(1).
- Andriani, P. J. A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Aryani, E. R. dan Kiswara, E. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Atiah, U., Ethika, dan Minovia, A. F. (2016). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Leverage, Struktur Kepemilikan dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Journal of Financial Economics* 9(1).
- Boussaidi, A. dan Hamed, M. S. (2015). The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Tunisian Context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1-12.
- Christiawan, Y. J. dan Tarigan, J. (2007). Kepemilikan Manajerial: Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 1-8.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., dan Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467-496.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, J. dan Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1-10.
- Hastuti, T. D. (2005). Hubungan antara Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi VIII*: 238-247.
- Hillier, D. J., Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jaffe, J., dan Jordan, B. D. 2010. *Corporate Finance (1st European Ed.)* Maidenhead: McGraw-Hill Higher Education.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2016.). *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 1(1), 147-167.
- Kemenkeu. (2020). Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaannegara-di-penghujung-2019/>. Diakses Tanggal 27 Januari 2020 (13:00).
- Kurniasih, T., dan Sari, M. R. M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58-66.
- Mahadwartha, P. A. dan Hartono, J. (2002). Uji Teori Keagenan dalam Hubungan Interdependensi antara Kebijakan Utang dengan Kebijakan Dividen. *Simposium Nasional Akuntansi 6*: 1-29.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *Journal of Manajemen Faculty of Economy Economy*, 4(1), 1901-1914.
- Nugraha, N. B. dan Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di BEI Selama Periode 2012-2013). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nugraheni, G. A. dan Murtin, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(1), 1-13.
- Oktaviana, L. L. dan Wahidahwati, W. (2017). Pengaruh Kepemilikan Saham dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(11).

- Pasaribu, M. Y., Topowijono, T., dan Sulasmiyati, S. (2016). Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 35(1), 154-164.
- Prayogo, K. H. (2015). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2012-2014). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Putri, A. A. dan Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 68-75.
- Rahmawati, A., Wi Endang, M. G., dan Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014). *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 1-9.
- Rusydi, M. K. dan Martani, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*, 17.
- Sari, I., Marheni, M., dan Yenfi, Y. (2017). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan Publik, Komite Audit, dan Leverage Terhadap Penerapan Konservatisme Akuntansi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Bisnis & Keuangan*, 13(2), 13-24.
- Scott, R. W. (2015). *Financial Accounting Theory*. Seventh Edition. Toronto: Pearson Prentice Hall.
- Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., and Brock, H. R. 1972. *An Introduction to Taxation*. California: Harcourt College Publishers.
- Sudana, I. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori & Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Suyanto, K. D. dan Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2), 167-177.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Van Horne, J. C. dan Wachowicz Jr, J. M. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Edisi 13, Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahidahwati. (2002). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan: Sebuah Perspektif Theory Agency. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5(1), 1-16.
- Yunitasari, D. (2014). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Agency Cost Terhadap Kebijakan Hutang pada Sektor Otomotif yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012. *Skripsi*. Universitas Widyatama Bandung. Bandung.